

**ANALISIS KEKALAHAN  
CALON PARTAI GOLKAR DALAM PILKADA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
PERIODE 2008-2013  
Studi Strategi Kampanye Politik**

**Asdar Abidin, Muh. Iqbal Sultan**

**Abstract**

This research aims to find out the strategy of political campaign and the factors influencing the defeat of regent/vice regent candidate proposed by Golkar Party. This study was a qualitative research. The data were obtained through direct observation and in-depth interview. The key and professional informants were determined by analysis approach. The results show that the campaign strategies applied by regent candidate proposed by Golkar Party are not optimal in terms of political communicators, political messages, political media, and electros. Meanwhile, the factors influencing the defeat the candidate are incumbent problems, supporting party, primordial, and direct district head election system that is implemented for the first time.

*Keywords: Communication strategy, Political Communication, Politcal Campaign*

**Abstrak**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menentukan strategi kampanye politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi kekalahan Partai Golkar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Polewali Mandar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Data diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara mendalam terhadap informan kunci yang telah ditetapkan secara selektif baik secara internal dalam partai maupun secara eksternal diluar partai. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Hasilnya menunjukkan bahwa srategi kampanye politik yang diterapkan oleh Golkar dalam pilkada Bupati dan Wakil Bupati kurang optimal dalam hal pmilihan komunikator politiknya, pesan-pesan politik yang disampaikan, media politik dan target sasaran yang akan memilih. Sementara itu faktor yang mempengaruhi kekalahan kandidat Golkar, karena ia menghadapi calon patahan (incumbent), dukungan partai, kekeluargaan, dan juga sytem pemilihan langsung yang pertama kali dilakukan di daerah ini.

*Kata Kunci: Komunikasi, Komunikasi Politik, Kampanye Politik*

**Pendahuluan**

Secara historis Sulawesi Barat (Sulbar) dikenal sebagai wilayah bermukimnya orang Mandar. Sebagai Untuk itu, Mandar merupakan etnis mayoritas yang mendiami wilayah ini. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik di Lima Kabupaten yang kemudian membentuk Provinsi Sulbar, separuh bagian penduduk Sulbar beretnis Mandar. Meski demikian, sulbar saat ini

tidak hanya dipengaruhi oleh penduduk beretnis Manadar. Sebanyak 14 persen penduduk beretnis Toraja dan 10 persen Bugis juga bermukim di Wilayah ini. Sisanya, kelompok bangsa ini. Dengan proporsi sebesar itu, Mandar tampak menonjol. Bahkan kerap kali wilayah provinsi termuda diindonesia ini diidentikkan dengan kewilayahan Mandar sejak berabad yang lalu.

Namun, dinamika politik yang diterapkan saat ini di Sulbar tak bisa dilepaskan dari Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai provinsi induknya. Sebelum Sulbar dipresentasikan oleh tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Mamasa (sekarang menjadi Polewali Mandar dan Kabupaten pemekaran Mamasa), Majene dan Mamuju (sekarang Mamuju dan Kabupaten pemekaran Mamuju Utara). Seperti juga politik Sulsel, Sulbar yang kental dengan identitas budaya itu berhasil “dikuningkan” Golkar.

Golkar pada Pemilu 1971 di wilayah Mandar memperoleh suara terbanyak. Perolehan suara yang berhasil dikantongi pada waktu itu mencaapai tiga perempat bagian dari total suara, yaitu 78 persen. Partai-partai politik lain. Terlebih partai bercorak keagamaan, tidak mampu menyaingi partai Golkar.

Dengan proposisi kemenangan mutlak yang diperoleh partai Golkar tersebut, pola-pola kemenangan partai dan kelompok yang merujuk pada identitas keagamaan pada pemilu 1955 tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada pemilu pertama ini, di wilayah Sulbar yang masa itu disebut Mandar bentukan pemerintah Kolonial Belanda.

Peserta pemilu yang berpaham agamalah yang berkibar. Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Nahdlatul Ulama (NU), yang merupakan representasi partai bercorak Keislaman, mampu mendominasi perolehan suara hingga dua pertiga bagian yaitu 54 persen. Partai Kristen Indonesia (Parkido) pun mampu meraih posisi kedua dengan 15,7 persen suara. Partai-partai bercorak nasionalis, sosialis, ataupun komunis tidak

banyak berpengaruh di wilayah ini (Sugihandari, 2009:8).

Pemilu 1977 semakin mengentalkan penguasaan partai berlambang pohon beringin yang berhasil meraih 48 persen suara. Demikian pula, empat kali penyelenggaraan pemilu Golkar selalu diatas 90 persen. Bahkan pada pemilu terakhir dimasa kekuasaan rezim orde baru (1997) partai pemerintah ini menang dengan perolehan suara 95 persen suara. Kemenangan Golkar, pada masa orde baru, tidak lepas dari kemampuan partai ini dalam meramu ideologi “pembangunan”. Di satu sisi, wilayah Sulbar yang terikat dalam wilayah konfederasi Pitu ba’bana binganga (tujuh kerajaan yang terletak di wilayah pesisir) dan Pitu ulunna salu (tujuh kerajaan yang wilayah pengunungan) ini terhuni oleh tiga suku buga besar, Mandar, Toraja, dan Bugis.

Walaupun kebebasan sikap politik masyarakat pada era reformasi, yang memberikan banyak pilihan terhadap masyarakat pada era reformasi, yang memberikan banyak pilihan terhadap masyarakat dalam menentukan sikap politiknya. Namun, kenyataan dilapangan dan hasil pengumuman KPUD setempat. Partai Golkar tetap menjadi pemenang dalam pemilu 1999 dan 2004. Dari perolehan sebelumnya di atas 90 persen, hasil pemilu 1999 memperoleh 61 persen angka ini semakin menurun pada pemilu 2004, hanya mampu meraih 44,7 persen suara (Sugihandari, 2009 : 8).

Penyusutan dukungan terhadap Golkar otomatis memberi peluang bagi partai lain. Bagi partai Golkar, ajang kontestasi politik lokal dalam pilkada yang

berlangsung tahun 2005-2008 juga tidak memberi peluang yang baik. Dari lima pemilihan bupati dan satu pemilihan gubernur, pasangan diusung partai Golkar hanya unggul pada pemilihan gubernur Sulbar dan pemilihan Bupati Mamasa. Dimamuju utara, pasangan PDI-P yang menjadi pemenang. Sisanya yaitu di Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, dimenangkan pasangan dari pasangan koalisi parpol. Dengan menggabungkan hasil kontestasi politik nasional 2004 dan berbagai hasil pilkada, tampak benar bahwa kekuatan partai Golkar memasuki masa rawan, sejalan dengan penguasaan wilayah di daerah yang sebelumnya dikuasai oleh partai Golkar.

Tampaknya banyak hal yang perlu dilakukan oleh Partai Golkar dalam merebut kembali simpati masyarakat di masa yang akan datang. Kebesaran nama dan pengalaman yang ditorehnya selama ini menjadi mandul dalam pecaturan politik nasional. Padahal Partai Golkar sebagai partai yang cukup berpengalaman dalam berbagai suksesi pemilihan kepala daerah selalu menepatkan calon yang diusung melalui mekanisme yang begitu lama dan sangat hati-hati. Perdebatan yang cukup alot dalam internal partai menjadi indikator betapa calon yang diusung tersebut telah melalui berbagai macam tahapan melalui dari ketokohan, kredibilitas, sampai dengan melakukan survey demi melihat seberapa banyak peluang dan nilai jual dari calon yang diusung tersebut.

Terpilihnya H. Andi Ibrahim Masdar-H. Tasmin Djalaluddin sebagai pasangan calon yang diusung oleh partai Golkar merupakan jawaban dari mekanisme

yang cukup panjang dalam menentukan kriteria calon. Tentu Partai Golkar mempunyai alasan sendiri mengapa H. Andi Ibrahim Masdar-H. Tasmin Djalaluddin menjadi calon kuat yang diusung dalam pilkada Kabupaten Polman Periode 2008-2013. Ketokohan dan kredibilitas keduanya telah teruji dalam sejarah Partai Golkar khususnya di Kabupaten Polman, apalagi seorang H. Andi Ibrahim Masdar telah lama berkecimpung dalam rana politik di Sul-sel sebelum pinda menjadi ketua DPD partai Golkar di Sulawesi Barat. Pengalaman dan dedikasinya sehingga menjadikan beliau layak untuk menjadi calon Bupati yang diusung oleh Partai Golkar.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar periode 2008-2013 yang telah dilaksanakan pada senin tanggal 27 Oktober 2008 lalu adalah bagian dari jalan panjang proses politik dari semua elemen masyarakat menuju kehidupan demokrasi yang lebih baik. Proses tersebut adalah momentum bersejarah bagi masyarakat Polewali Mandar dimana untuk pertama kalinya memilih pemimpin daerahnya secara Demokratis, langsung, umum, bebas, jujur, adil dan rahasia.

Pilkada tersebut diikuti oleh enam pasangan calon masing-masing pasangan Nomor 1, atas nama H. M Yusuf Tuali dan Hj. Sri Upiati Rauf yang disingkat YUSRI merupakan calon independen. Pasangan Nomor 2 atas nama H. Zainal Abidin dan Drs. Abdul Wahab Hasan Sulur yang disingkat ZAH diusung PKS dan PDK, adalah masing-masing Ketua DPW PKS dan anak ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Pasangan Nomor 3 atas nama DR. Abd.

Rahman Razak, SE, MS dan Drs. Suaib calon independen. Keduanya merupakan perpaduan akademisi dan birokrat. Pasangan Nomor urut 4, H. Nadjamuddin Ibrahim, S.MI., MM yang di singkat ABM-NA diusung oleh 13 partai, antara lain Partai Merdeka, Pelopor, PAN PBR, PBB dan beberapa partai non parlemen lainnya adalah pasangan incumbent dimana pada periode 2003-2008 H. Muhammad Ali Baal Masdar, M.Si adalah Bupati Kabupaten Polewali Mandar.

### Rumusan Masalah

Dari uraian di atas penulis menyampaikan beberapa pertanyaan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi kampanye politik calon Bupati/Wakil Bupati yang diusung partai Golkar dalam mengikuti Pilkada Kabupaten Polewali Mandar Periode 2008-2013 ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kekalahan calon Bupati/Wakil Bupati yang diusung oleh partai Golkar dalam Pilkada Kabupaten Polewali Mandar Periode 2008-2013 ?

### Kajian Konsep dan Teori

#### *Konsep Komunikasi Politik*

Bertolak dari konsep komunikasi politik yang merupakan uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka upaya yang dimaksud untuk memahami konsep komunikasi politik menurut Dahlan (1999) dalam cangara (2009:35) ialah suatu bidang atau disiplin

yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Defenisi lain tentang komunikasi politik juga diuraikan oleh Meadow dalam Nimmo (2004) dalam cangara (2009 : 35) ialah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mmempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik, defemisi lain tentang saluran (media), penerimA sampai pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan yang optimal.

#### *Unsur-unsur Komunikasi Politik*

Komunikasi politik sebagai *body of knowledge* memiliki unsur-unsur yang terdiri dari sumber (komunikator), penerima (komunika),message (pesan), media atau saluran, dan efek. Nimo (1987) dalam cangara (2009 : 37 ). Carl I Hoveland dalam Sumarsono (1989 : 35 ) mengemukakan bahwa unsurunsur ini dalam komunikasi politik terdapat dalam tiga situasi atau struktur politik, yaitu unsur suprastruktur politik, infrastruktur politik unsur komunikator maupun komunikan. Berikut penjelasan masing-masing unsur tersebut.

##### a. Unsur-unsur pada suprastruktur

Unsur yang terdapat pada suprastruktur politik terdiri dari tiga kelompok, yaitu yang berada pada lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga yudikatif. Tiga kelompok ini berasal dari elit politik, elit militer, teknorat dan pprofesional. Keseluruhan kelompok ini biasanya mencerminkan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat (isnfrstruktur), karena terwujudnya

prastruktur pada hakikatnya merupakan produk keterlibatan seluruh unsur yang ada pada infrastruktur.

b. Unsur-unsur pada infrastruktur

Sebagaimana suprastruktur, maka infrastruktur pun diwujudkan oleh unsur-unsur komunikasi politik, dimasa unsur-unsur ini dibagi dalam asosiasi-asosiasi atau kelompok-kelompok, antara lain : partai politik (*political party*). Kelompok yang mempunyai kepentingan (*interest group*), kelompok penekan (*pressure group*), media komunikasi politik ( *media of political communication*), kelompok mahasiswa (*student group*) dan pars tokoh politik (*political figures*).

Kelompok wartawan dan kelompok mahasiswa dipisahkan dari kelompok *interest*, karena wartawan sebenarnya merupakan kelompok yang menjembatani antar suprastruktur dan infrastruktur hanya dilandasi oleh nilai yang memandang suatu keadaan sehingga apa yang dilakukan bersifat murni.

c. Unsur komunikator dan komunikan politik unsur yang paling menentukan dalam setiap bentuk komunikasi politik adalah komunikator dan komunikan. Kedua unsur ini mempunyai daya tarik yang kua, karena keduanya merupakan dua unsur yang berbeda dalam nilai dan fungsinya.

Schramm (1971:39), membedakan antara komunikator dan komunikan sebagai dua satuan yang terpisah (*two separate units*) yang mengadakan dua kegiatan yang terpisah pula (*two separate acts*). Secara sosiologis perbedaan ini dinyatakan sebagai

jarak sosial yang disebabkan oleh latar belakang situasi dan kondisi sosial budaya serta kondisi politik yang berbeda.

Hal yang paling esensial dalam komunikasi politik adalah bagaimana menserasikan kedua fungsi yang berbeda agar tumbuh situasi dan keadaanyang saling menguntungkan (*simbiose mutualis*), baik dalam komunikasi internal atau komunikasi yang berlangsung dalam lingkup negara maupun komunikasi yang berlangsung dalam lingkup negara maupun komunikasi eksternal yang melintas batas wilayah negara (*international communication*).

*Konsep Kampanye Politik*

Kampanye politik penuh dengan retorika, seperti aktor politik tertentu menantang kualifikasi pesaing politiknya, bahkan dukungan editorial surat kabar, majalah, televisi dan radio juga mengikuti garis demonstratif, memperkuat sifat-sifat positif kandidat yang didukung sekaligus memperteguh sifat-sifat negatif lawan politiknya.

Menurut Aristoteles yang dikutip Nimmo (1989) dalam Sirajuddin (2005 : 14 ), bahwa dalam pengklasifikasian jenis-jenis kampanye politik, dapat diidentifikasi melalui tiga cara pokok, yaitu deliberatif, forensik, dan demonstratif. Kampanye politik deliberatif dirancang untuk mempengaruhi orang-orang dalam masalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan menggambarkan sejumlah keuntungan dan reguan dan relatif dari cara-

cara alternatif dalam melakukan segala sesuatu. Fokusnya adalah sesuatu yang akan terjadi dimasa depan ditentukan dimasa depan jika ditemukan kebijakan tertentu. Jadi, ia menciptakan dan memodifikasi pengharapan atas hal ihwal yang akan datang.

Sementara kampanye politik forensik adalah persoalan yuridis, kampanye ini berfokus pada apa yang terjadi dimasa lalu untuk menunjukkan apakah bersalah atau tidak, pertanggungjawaban, atau hukuman dan ganjaran. Pada prinsipnya kampanye ini berusaha mengungkap berbagai pelanggaran yang sedang atau telah dilakukan para pesaing politiknya sehingga memungkinkan khalayak berubah sikap terhadap pilihan politiknya saat pesta pemilihan umum.

Terakhir adalah kampanye demokratis yang dilakukan melalui epideiktik, artinya wacana yang memuji dan menjatuhkan lawan yang menjadi pesaing politik. Tujuannya adalah untuk memperkuat sifat baik atau *brand image* partai politik beserta aktor-aktornya sekaligus mempengaruhi citra buruk partai politik pesaing beserta aktor-aktor politiknya.

### *Strategi kampanye politik*

Dalam pembahasan ini, penulis mengemukakan beberapa pengertian strategi dan kampanye. Strategi adalah cara khusus untuk menerapkan satu atau kombinasi dari hal-hal tersebut terhadap permasalahan riset. Profesionalitas terutama terdiri dari integritas dan kualitas suatu strategis, yang

balk cocok secara sistematis dan koheren dengan masalah, teori metode dan tehnik sekaligus (Apter, 1987;31).

Strategi adalah pendekatan keseluruhan untuk suatu program atau kampanye. Kampanye memerlukan manajemen kampanye yang rapi dan strategi kampanye yang jitu, sehingga dapat dikembangkan suatu konsep kampanye yang vital. Hal ini dimuali dengan perumusan gagasan vital dengan tema kampanye yang persuasif yang kemudian disusun perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan seterusnya, sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. (Arifin, 200;82)

Ruslan (2005 ; 37) menyatakan strategi pada hakikatnya adalah suatu perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya. Tujuan utamanya menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dalas Burnett ( dalam Ruslan 2005 : 38 ) adalah;

1. *To secure understanding*, untuk memastikan terjadi suatu pengertian dalam berkomunikasi.
2. *To establish acceptance*, bagaimana cara pemerintahan itu dibina dengan baik.
3. *To motive action*, penggiatan motivasinya
4. *The goals which the communicator sought to achieve*, bagaimana mencapai tujuan yang hendak di capai oleh pihak

komunikator dari proses komunikasi tersebut.

Sementara pengertian kampanye dikemukakan oleh Kotler dan Roberto (1989) dalam Cangara (2009 : 284) adalah “ *capagain is an organized effort conducted by one group (the change agent) which intends to persuade others (the target adopters), to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes, practices and behavior.* ” Kampanye adalah sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok, (agen perubahan) yang ditunjukkan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu.

#### *Partai Politik dan Pilkada*

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik yang moderen yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah (legitimate) dan damai (Aural;1988:xi).

Cukup banyak sarjana yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengenai pengertian partai politik, antara lain Carr (1965) dalam Cangara (2009 : 208) “ *a political party is an organization that attempts to achieve and maintain control of government* ” ( partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap

pemerintah ).

Partai politik, menurut ketentuan umum yang terdapat dalam UU RI NO 31 tahun 2002, adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Partai politik dikatakan merupakan representasion of ideas atau mencerminkan suatu presepsi tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan dan hendak diperjuangkan. Ideologi, platform partai atau visi dan misi seperti inilah yang menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan partai politik. Partai politik juga merupakan pengorganisasian warga negara yang menjadi anggota untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan negara dan masyarakat yang dicita-citakan tersebut. Karena itu partai politik merupakan media atau sarana partisipasi warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan kebijaksanaan publik dan dalam penentuan siapa yang menjadi penyelenggara negara pada berbagai lembaga negara di pusat dan daerah. Badjoeri Widagdo (2004 ; 32).

#### **Kerangka Pikir**

Untuk memudahkan dalam pembahasan menyangkut masalah ysmg diteliti, maka digambarkan kerangka pikir sebagai berikut : (lihat Bagan)

#### **Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kabupaten

Polewali Mandar (Polman) Provinsi Sulawesi Barat selama 2 (dua) bulan yaitu April s/d bulan Mei tahun 2009.

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Tujuan penelitian untuk menelaah sikap dan perilaku dalam lingkungan yang artifisial seperti dalam survey dan eksperimen (mulyana, 2007 :3).

Kajian kualitatif dimaksudkan untuk menyediakan untuk menyediakan pemerhatian yang deskriptif yang sistematis dan berdasarkan pada konteks dan dapat memberikan ruang bagi peneliti untuk belajar tentang suatu sistem serta hubungan semua aktivitas dalam sistem tersebut yang dapat dilihat secara global dan bukan secara sebagian saja Glesne dan Peskhin, (1992) dalam Noriah, (1997).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berpegang kepada paradigma naturalistik atau fenomenologi. Ini karena penelitian kualitatif senantiasa dilakukan dalam setting alamiah terhadap suatu fenomena (Ikandar, 2008 : 187). Sesuai dengan tipe penelitian yang tipe kualitatif (qualitative approach) dengan pendekatan analisis SWOT, maka peneliti akan mendiskripsikan data yang diperoleh guna menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka peneliti akan mengambil beberapa informan kunci yaitu Calon Bupati/wakil Bupati ( H. Andi Ibrahim Masdar-H.Tasmin Dja-laluddin), Ketua Tim pemenangan Partai Golkar pada Pilkada Kabupaten Polman periode 2008-2013. Serta informan ahli

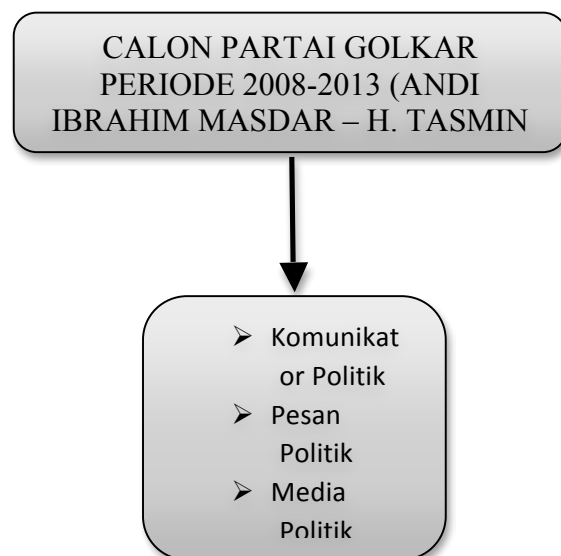
Jenis Data, yakni (1) Data Primer, Data yang bersumber dari informan utama/internal (calon Bupati/wakil Bupati yang diusung oleh Partaoi Golkar), Sekretaris/Fungsionaris Partai Golkar, dan Ketua Tim Pemenangan Partai Golkar. (2) Data sekunder, Data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti berupa buku, majalah, surat kabar, internet, serta literatur yang diberkaitan dengan masalah penelitian.

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, maka peneliti menjadi instrumen utama dalam memperoleh data di lapangan dengan menggunakan dua macam teknik, yakni : (1) Observasi dan (2) wawancara mendalam secara terjadwal terhadap informan. Mengenai teknik pengumpulan data di lapangan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap infroman.

- a. Wawancara, yaitu melakukan wawancara

**SRUKTUR**

- Komunikator Politik





b. Keputusan dan dokumentasi

Keputusan di gunakan untuk mencari konsep-konsep dan landasan teori yang digunakan, baik dari buku, diktat, jurnal, majalah, surat kabar, internet, dan sebagainya.

Adapun teknik analisis data, yakni berpedoman pada prinsip penelitian kualitatif, analisis data dilakukan ketika sedang melakukan penelitian lapangan sampai ketika peneliti telah selesai melakukan pengumpulan data. Menurut Milles dan Hubberman (1992:18) bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat tiga arus kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis. Dilapangan maupun hasil wawancara yang ada. Reduksi data ini merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data hingga kesimpulan akhirnya dapat diverifikasi.

Selain dari itu, juga digunakan teknik analisis SWOT, Menurut Wahyudi(1996 : 50) bahwa “ analisis SWOT adalah analisa perusahaan baik melalukan analisa internal”. Dalam analisa eksternal perusahaan menggali dan mengidentifikasi semua opportunity (peluang) yang berkembang dan menjadi trend pada saat itu, serta Treat (ancaman) dari pesaing dan calon pesaing.

Sedangkan dalam analisa lebih memfokuskan pada identifikasi strenght

(kekuatan) dan weakness (kelemahan). Sedangkan menurut Rangkuti (2008 :18):

“Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (Threats).”

Dalam konteks komunikasi politik, analisis SWOT bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor strategi yang berkaitan dalam membuat keputusan. Menurut Cangara (2008 : 231 ). Untuk menetapkan strategi, dapat di gunakan model SWOT sebagai peralatan untuk menganalisis:

S= Strengths ( kekuatan-kekuatan yang dimiliki calon/partai)

W= weakness ( Kelemahan-kelemahan yang ada pada calon/partai)

O= opportunities ( peluang-peluang yang mungkin diperoleh calon/partai)

T= Threats (Ancaman-ancaman yang bias yang di peroleh oleh calon/partai)

### Hasil Penelitian

Partai Golkar adalah jelmaan dari Golongan Karya (Golkar) di era pemerintahan Presiden Soekarno selalu unggul dalam perolehan suara mulai dari Pemilu 1971 hingga 1997. Golkar sendiri merupakan kelanjutan dari sekertariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang didirikan pada 20 Oktober 1961 di Jakarta, yang selanjutnya selalu diperingati sebagai hari lahirnya Partai Golkar.

Pembentukan sekber Golkar merupakan inisiatif dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah adanya pengakuan tentang kehadiran dan legislatif golongan fungsional di MPRS dan front Nasional. Dasar pertimbangannya antara lain adalah munculnya peraturan presiden Nomor 12 tahun 1959 untuk mengangkat 200 orang wakil-wakil golongan karya yang tidak berafiliasi pada partai politik di MPRS. Peraturan tersebut kemudian di perkuat oleh keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1954 yang memnagkui wakil-wakil golongan karya di front nasional. Selain itu kehadiran front Nasional sendiri bertujuan untuk mengahadapi tekanan-tekanan dari Partai Komunis Indonesia (KPI). (Baca Materi Pengkaderan Partai Golkar Makassar : 2001).

Pada masa awal pertumbuhannya Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional hingga kemudia berkembang menjadi 291 organisasi. Organisasi-oraganisasi itu kemudian dikelompokkan dalam tujuh kelompok induk organisasi (Kino) yaitu kono Kosgoro Kino SOKSI, Kino MKGR, Kino Profesi, Kino Ormas Hankam, Kino Gakari, dan Kino Gerakan pembangunan. Pertumbuhan Sekber ini juga secara menyeluruh, diikuti dengan perkembangannya di seluruh Indonesia, sehingga hampir setiap pelosok Indonesia, sehingga hampir di setiap pelosok Indonesia golkar sudah sangat menagakar di masyarakat. Pada tahun 1971, untuk pertama kalinya Sekber Golkar mengikuti pemilu dan langsung meraih suara pemilih terbanyak 67,2%. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dan ketetapan MPRS

mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, maka pada tanggal 17 Juli 1971 Musyawarah Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar. Nama Golkar kemudian dikukuhkan secara resmi pada Munas Golkar, 4-5 September 1973 di kota Surabaya, Jawa Timur. ( Baca Materi Pengkaderan Partai Golkar Makassar : 2001)

#### *Komunikator Politik*

Komunikator politik dimaksud dalam hasil penelitian ini adalah orang yang memiliki Kreadibilitas sebagai Komunikator. Kreadibilitas menurut Jalaluddin Rahmat (1985) dalam Arifin (2006 :45) adalah seperangkat persepsi khalayak tentang sifat-sifat komunikator yang sekanjutnya di sebut komponen kreadibilitas. Hovland dan Wiss menjelaskan bahwa kreadibilitas aau ethos itu sendiri dari dua komponen yaitu keahlian (experties) dan dapat dipercaya Trust Worhies). “ Saya mengenal saudara Andi Ibrahim semasa aktif di DPRD Sul-Sel, jadi ketika mendengar beliau layak dan pantas karena melihat sepak terjangnya selama ini cukup bersih.” (wawancara Ma;mun Hasanuddin, Juni 2009)

#### *Pesan Politik*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tim kampanye partai Golkar Fahriruddin. Pesan-pesan kampanye menjadi mutlak dilakukan dengan sebaik mungkin dengan tetap mengedepankan situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Banyak hal yang du lakukan oleh Bupati Polman terpilih, dan salah satunya adalah pesan dalam kampanye menjadi kenyataa. “ pesan-pesan kampanye

yang kami tawarkan sangat bervariasi dengan konteks masyarakat Mandar tang malaqbi, yaitu mengedepankan kemampuan dan tidak tergantung kepada orang lain. Dan inilah cerminan masyarakat mandar yang sesungguhnya.” (Fahriruddin, Juni 2009)

Pesan politik pada umumnya merupakan program-program partai politik yang dibawa oleh komunikator politik. Bagi calon Bupati/Wakil Bupati yang diusung oleh partai Golkar, beban terberat bukan lagi pada tahapan memperkenalkan partai, tetapi lebih dari itu bagaimana pesan bisa menyentuh pada relung hati pemiliknya. Terutama bagaimana tema yang diangkat bertepatan dengan apa yang semestinya diinginkan oleh masyarakat itu sendiri.” Mantap (memegang amanah tanpa pamrih) adalah slogan/jargon kampanye yang selalu kita dengung-dengungkan dalam setiap kampanye kami.” (Andi Ibrahim Masdar, Mei 2009)

#### *Media Politik*

Penggunaan media politik dalam komunikasi politik, perlu dipilih dengan cermat untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi khayalak dengan memperhatikan sistem komunikasi politik di Negera tersebut. Hal ini merupakan langkah strategi yang sangat penting, setelah mengenal khayalak, penyusunan pesan, dan menetapkan metode. Berikut wawancara dengan informan ahli : “ Masyarakat Mandar itu masih sangat jauh dari penerapan teknologi komunikasi secara keseluruhan, jadi informasi yang diberikan sejauh mungkin dapat disalurkan melalui media

komunikasi politik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin salah satunya adalah penggunaan sarana masjid, sebagai tempat mereka berkumpul dan berdiskusi. “ (Ma'mun Hasanuddin, Juni 2009).

#### *Khalayak Pemilih*

Khalayak bisa di sebut dengan istilah penerima, sasaran, pembaca, pendengar, pemirsa, audiens, decode, atau komunikan. Khalayak adalah salah satu aktor dalam proses komunikasi, karena itu tidak boleh diabaikan, sebab berhasil tidaknya suatu komunikasi sangat ditentukan oleh khalayak. (Cangara, 2005:35). Berikut wawancara peneliti dengan budayawan Mandar Muis mandar “Masyarakat polman itu sangat menjunjung tinggi demokrasi, olehnya itu tingkat partisipasi mereka sudah terlihat dari pemilu legislatif lalu, dan untuk pilkada bupati polman juga demikian, sehingga bagi bakal calon bupati harus bekerja dengan cepat dan cermat untuk mempengaruhi mereka dengan strategi masing-masing.”(Mius Mandar, Juni 2009)

Achmad (25:1992), membagi khalayak massa menjadi dua yaitu khalayak ramai (General Public), yaitu khalayak yang tidak terbentuk (amorpheus), umum dan heterogen tidak memiliki ikatan ataupun keterkaitan pertalian dengan anggota lainnya. Tidak menyadari tentang dirinya sebagai salah seorang dari kelompok suatu jenis khalayak, sehingga bebas memberi reaksi kepada pesan-pesan media massa. Khalayak khusus, jenis khalayak ini tempatnya berpencar-pencar atau pada dasar anonim, terbentuk dari individu-individu yang mempunyai kepentingan dan orientasi

yang sama dan menyebabkan menjadi anggota dari khalayak yang sama.

### **Pembahasan**

Analisis terhadap komunikator politik untuk mengetahui berbagai strategi kampanye politik calon Bupati/Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Golkar dalam Pilkada Kab. Polman periode 2008-2013 melalui pendekatan analisis SWOT. Dapat diuraikan melalui kutipan-kutipan yang diperoleh dengan melakukan interview kepada beberapa informan kunci dan ahli yang telah ditetapkan pada bab III dalam penelitian ini.

Secara umum, kekuatan (*strength*) calon Bupati/Wakil Bupati yang diusung partai Golkar telah melakukan kegiatan komunikasi politik terhadap masyarakat pemilih dengan melakukan perencanaan strategi kampanye seperti membentuk juru kampanye, menyeleksi pesan politik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memilih media politik sesuai dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap media tersebut, juga memetakan khalayak pemilih dengan melakukan survey dan menjaga elektabilitas pemilih.

Apa yang dilakukan oleh juru kampanye Golkar termasuk Calon Bupati/Wakil Bupati untuk banyak melakukan dan menyambangi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, kemasyarakatan, serta kunjungan sosial merupakan kewajiban mutlak setiap calon dalam kampanye.

Dalam membahas komunikator politik paling tidak ada dua (2) aspek yang penting yaitu, *pertama calon/figure kandidat*. Menghadapi Pilkada 2008-2013, Partai Golkar sebagai pengusung tunggal calon

Bupati/wakil Bupati telah melakukan salah satu strategi di dalam memenangkan Pilkada, termasuk membuat aturan tertulis untuk proses seleksi dan nominasi calon/kandidat. Secara normatif untuk seleksi dan nominasi calon/kandidat didasarkan pada Keputusan Rapat Partai Golkar tanggal 28 juli 2008.

Keputusan memilih pasangan Andi Ibrahim Masdar sebagai calon Bupati adalah sebuah langkah yang cukup baik dan strategis, mengingat sepak terjang beliau selama menjadi anggota DPR Sul-Sel sampai pemakaran wilayah menjadi provinsi Sulawesi Barat, kredibilitas beliau telah teruji dan bahkan relatif bersih sampai sekarang. Tentu dapat di pahami bahwa masyarakat Polman menginginkan pemimpin yang patut di contoh baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

Penetapan calon dan tokoh sebagai juru kampanye memberikan kekuatan tersendiri dalam menghadapi pertarungan politik, di mana setiap pasangan harus

Kekuatan (*stregth*) lain adalah sebagai partai yang selalu mengedepankan keterbukaan dan memberikan kesempatan kepada setiap orang walaupun bukan kader/pengurus. Partai Golkar dalam menyeleksi dan memutuskan calon yang dianggap mampu dan layak untuk diusung calon mendaftarkan diri.

Seperti di ketahui, bukan hanya pasangan Andi Ibrahim Masdar yang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati. Pasangan incumbent Ali Baal Masdar juga memanfaatkan mekanisme pendaftaran dengan datang mengambil formulir di sekretariat partai Golkar walaupun ditengah seleksi tidak

mengikuti tahap terakhir (pengembalian formulir pencalonan).

*Kedua, Tokoh dan Citra Partai Golkar.* Melihat peta politik pasca reformasi di Sulawesi Barat, Partai Golkar masih dominan dalam menguasai wilayah konskuensinya. Termasuk di Kab. Polman, partai Golkar digambarkan sebagai partai yang mapan dan tidak perlu berusaha payah mencari Calon/kandidat/tokoh untuk menjadi komunikator politiknya. Termasuk menentukan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati untuk diusung menjadi Bupati/wakil Bupati untuk diusung menjadi Bupati/Wakil Bupati Kab. Polman periode 2008-2013.

#### *Analisis terhadap Pesan Politik*

Kekuatan (strength) pesan politik yang disampaikan oleh calon Bupati, tim sukses dan fungsionaris Partai Golkar pada prinsipnya berusaha menyentuh masyarakat dengan program-program yang ditawarkan. Seperti dalam program pertanian dengan pengadaan air yang cukup serta ketersediaan pupuk yang menandai merupakan program yang langsung disarankan oleh masyarakat. Kemudian program lain seperti umrah gratis bagi iman, guru ngaji, masyarakat yang tidak mampu juga memberi kesempatan bagi masyarakat.

Kemudian program ketiga yang ditawarkan adalah membangun SPBU nelayan bagi masyarakat nelayan. Seperti diketahui salah satu kendala masyarakat nelayan di daerah pesisir di kab. Polman adalah sulitnya mendapatkan BBM sebagai motor penggerak bagi para nelayan untuk turut melaut. Akan tetapi, kejelihan pasanganyang diusung oleh Partai Golkar ini

menjadi program unggulan mereka dalam melakukan pesan politik dalam kampanye.

Dalam sudut strategi, apa yang dilakukan oleh pasangan calon yang diusung oleh Partai Golkar disebut strategi pesan. Menurut Firmanzah (2007:28) Dalam strategi pesan, pesan atau program-program yang diangkatsejauh mungkin sesuai dengan isu-isu politik yang sedang berkembang di masyarakat. Pesan itu juga membuka dan mengungkapkan tentang telah terjadinya sesuatu yang sedang dihadapi masyarakat. Pesan tersebut tidak sekedar waana, tetapi juga mengandung cara pemecahan.

Namun kekalahan yang dialami oleh pasangan yang diusung oleh partai Golkar, sedikit banyak berpengaruh dari cara mengemas pesan. Pengemasan sangat berperan dalam pengarahan cara masyarakat memaknainya. Pesan yang diangkat harus sesuai dengan isu-isu politik yang sedang berkembang dalam masyarakat.

Walaupun pesan politik telah disampaikan oleh pasangan Golkar dalam Pilkada tersebut, namun bukan berarti telah menjawab persoalan yang sesungguhnya dihadapi oleh masyarakat. Pesan tidak hanya sebagai wacana (disclosure) tetapi ada pemecahan. Apa yang dilakukan oleh pasangan ini,

Menurut penulis, kekuatan (strength) isi pesan pasangan partai Golkar bukan tidak mempunyai wacana dan pemecahannya, tetapi diluar itu masih banyak hal yang belum dilakukan oleh pasangan ini mengemas pesan itu secara tuntas. Sehingga memicu kelemahan (weakness) terutama dalam memperjuangkan pemberdayaan kearifan lokal, seperti peningkatan usaha

terutama sutra Mandar yang menjadi budaya dan hasil kerajinan tangan masyarakat di pedesaan.

#### *Analisis terhadap strategi media politik*

Tidak bisa dipungkiri kekuatan (strength) pemilihan media politik yang selektif menjadi salah satu penentu dalam mensosialisasikan program kerja, visi misi, serta membentuk citra pasangan dan partai. Apa yang dilakukan oleh pasangan partai Golkar dalam melakukan kampanye yaitu memilih media cetak (Radar Sulbar) dan media elektronik (Ananda FM, Sawerigading FM) dan beberapa media luar ruang (baliho, spanduk), dan media format kecil (kalender, brosur, pamlet) adalah bukti cara pasangan ini untuk mensosialisasikan diri/pasangan kepada masyarakat.

Penggunaan dan pemilihan media seperti yang dilakukan oleh Pasangan Partai Golkar adalah pemilihan berdasarkan atas sifat isi pesan yang ingin disampaikan, sifat isi pesan media maksudnya kemasan pesan yang ditunjukkan untuk masyarakat luas, dan pesan media disampaikan melalui media massa misalnya surat kabar, televisi. (Cangara, 2009; 375). Lebih lanjut dikatakan oleh informan dalam penelitian ini bahwa penggunaan media memang harus mengandalkan dana yang banyak, selain pengumpulan media pesan berdasarkan tempat dan komunitas yang poenguninya.

Namun apa yang dilakukan oleh pasangan yang diusung oleh Partai Golkar tersebut masih belum maksimal karena terkendala oleh sistem Pilkada termasuk jadwal kampanye, kegiatan kampanye yang seharusnya dilakukan sesuai dengan jadwal

kadang molor bukan ditunda akibat penyampaian secara mendadak oleh KPUD setempat.

Strategi yang dilakukan melalui media, menurut penulis ada yang belum maksimal dan efektif. Pemilihan media cetak dan elektronik rupanya belum tepat untuk kondisi masyarakat kabupaten Polman yang lebih banyak di pedesaan. Penggunaan media cetak seperti koran menjadi tidak efektif karena masyarakat tidak banyak berlangganan atau bahkan membaca koran, begitu pula penggunaan media radio, tumbuhnya TV kabel dan beragamnya channel TV justru tidak dimanfaatkan oleh pasangan ini. Padahal masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya menonton TV dibandingkan media lainnya.

#### *Analisis terhadap strategi*

##### *Khalayak pilih*

Seperti yang disampaikan pada hasil penelitian sebelumnya, bahwa khalayak pilih adalah salah satu aktor dalam proses komunikasi, karena itu tidak boleh diabaikan, sebab berhasil tidaknya suatu komunikasi sangat ditentukan oleh khalayak (cangara, 2005 : 135). Apa yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati Partai Golkar dan tim suksesnya adalah dengan memetakan segmen pilih, kemudian memberi pesan-pesan politik sesuai dengan kebutuhannya, ini adalah salah satu kekuatan (strength) kemahiran dan kejelian membaca pasar (segmen).

Segmen nelayan memerlukan pesan politik tersendiri, begitu pula segmen masyarakat petani dengan melihat

kebutuhan dasar mereka dalam bertani. Tentu yang diperlukan adalah pupuk dan air bersih yang memadai. Strategi pasangan yang diusung oleh partai Golkar adalah dampak dari keingintahuan terhadap permasalahan masyarakat untuk menjadi lebih baik dan sejahtera sehingga setiap kampanyenya mensosialisasikan program-program yang sesuai dengan segmen masyarakat tadi.

Strategi politik terpenting dalam memenagkan pilkada adalah memahai dan memetakan karakteristik disetiap kelompok masyarakat. Pemahaman dan pemetaan kelompok-kelompok masyarakat digunakan untuk memperkuat atau mengokopkan pendekatan dan komunikasi politiknya, khususnya pada masa kampanye.

Pada bagian hasil penelitian, yang dikemukakan oleh tim sukses partai Golkar bahwa disamping memetakan kelompok masyarakat berdasarkan demografi pekerjaan mereka juga membagi kelompok besar yang berpotensi untuk memilih calon yang diusung yakni (1) keluarga besar atau kerabat; (2) anggota/ simpatisan/ organisasi binaan; (3) kelompok agama; (4) pengusaha/pekerja ; (5) kalangan birokrasi ; (6) komunitas social dan teman pergaulan. Dasar pengelompokkan adalah keyakinan (belief) da survey, keyakinan dimaksud karena interaksi dan komunikasi yang dibangun selama ini baik terencana dan tidak reencanakan.

Kelemahan (weakness) memetakan khalayak pemilik karena luas dan beragamnya kelompok masyarakat yang dijadikan sebagai target memilih atau yang didekati menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati/Wakil

Bupati yang diusung oleh partai golkar ini, memilih menggunakan pendekatan untuk semua menjadi ciri konsestan atau partai politik yang dekat untuk memperjuangkan ideologi nasionalisme. Sedemikian pentingkah ideologi mempengaruhi pilihan dalam pemungutan suara?

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan setelah dianalisis dan dibahas sebagai berikut:

1. Strategi kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Golkar dalam Pilkada Kab. Polman periode 2008-2013 adalah dengan memasang juru kampanye yang kredibel, menetapkan pesan politik yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, melakukan pemilihan media yang selektif, serta memetakan potensi khalayak pilih. Namun pada hasil penelitian ini, menunjukkan adanya faktor lain yang diusung oleh Partai Golkar antara lain, faktor incumbent, tidak ada koalisi partai, kuatnya politik aliran, serta adanya system pilkada yang semakin terbuka.
2. Adanya faktor-faktor lain tersebut yang mengakibatkan kekalahan partai Golkar menurut informan sebagai berikut, *pertama*, masalah incumbent. Hampir semua pelaksanaan Pilkada di daerah dimenangkan oleh pasangan

incumbent, karena kedudukan incumbent dianggap masih kuat dan matang dalam merencanakan komunikasi politik, termasuk mempengaruhi PNS sebagai salah satu mesin politiknya. Apa yang dilakukan oleh pasangan incumbent sesuai dengan teori komunikasi dua tahap yang menganggap bahwa posisi opini leader masih sangat kuat mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya. Kemudian faktor berikutnya adalah politik aliran. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan politik di Kab. Polman masih dipengaruhi oleh kuatnya politik aliran, masyarakat masih mampu dipengaruhi keterikatan kekerabatan dengan pesan-pesan politik yang dilakukan oleh juru kampanye. Kegiatan kampanye dengan melibatkan keluarga misalnya, bagi masyarakat masih dianggap sakral karena dukungan moral yang diberikan. Sehingga muncul banyak pendapat yang mengatakan bahwa pasangan incumbent mendapat restu dari orang tua. Hal tersebut sesuai dengan teori lingkaran kesunyian yang memaknai bahwa kekuatan opini publik lebih kuat dibandingkan dengan media sekalipun. Kemudian faktor berikutnya adalah tidak adanya koalisi yang dibangun oleh partai Golkar serta diberlakukannya UUD Pilkada Langsung. Kedua faktor tersebut menjadi kelemahan di tingkat partai Golkar. Sehingga ketika media cetak menayangkan ke

masyarakat baik melalui polling dan lembaga informasi lainnya, masyarakat cenderung menerima dan mempercayai informasi tersebut. Hal ini sesuai dengan teori lingkaran kesunyian yang berpendapat bahwa khalayak sama sekali tidak mampu menolak informasi setelah ditembakkan oleh media komunikasi.

### Daftar Rujukan

- A.Achmad,A.S. 1990.*Manusia dan informan* , Ujung Pandang : Hasanuddin University Press.
- Alkhatib, Umar Ibnu. 2009. *Dari Beringin Ke Beringin: Sejarah, Kemelut, Resistensi, dan Daya Tahan Partai Golkar*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Apter, David E. 1987. *Pengantar Analisa Politik*, LP3ES, Jakarta.
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik Demokrasi : Konsep, Teori, dan Aplikasib Pemasaran Politik. Materi kuliah*.
- Effendy, Onnong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, Bandung* : PT Citra Aditya Bakti.
- Firmanzah . 2008. *Marketing Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kaloh, J.prof, R. 2008. *Demokrasi dan Kearifan Lokal Pada Pilkada Langsung*, Jakarta : kata Hasta Pustaka.
- Mc. Quail, Dennis. 1987. *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, alih Bahasa oleh Agus Darma dan Aminuddin R, Jakarta : Erlangga.
- Moeliono, Anton M dkk. 1989. *Kamus*



*Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Mulyana, Deddy. 200. *Metode penelitian Komunikasi : Contoh-contoh penelitian Kuantitatif dengan pendekatan praktis*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Prihatmoko, Joko J. 2008. *Memang Pemilu di Tengah Oligari partai*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan LP3M Univ. Wahid Hasyim Semarang.

Rangkuti, Freddy. 2008. *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis, Reorientasi Konsep Perencanaan strategi Menghadapi Abad 21*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Siswowiharjo, Tri Agus S dkk. 2004. *Media dan Pemilu*, Jakarta : *The South East Asian Press Alliance bersama Koalisi Media untuk Pemilu*.

Soemarsono. 1989. *Komunikasi Politik*, Jakarta : Universitas Terbuka.

Tandjung, Akbar. 2007. *The Golkar Way : Survival Partai Golkar di tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Wahyudi, Agustin Sri. 1996. *Manajemen Strategik Pengantar proses berpikir strategik*, Jakarta : Binarupi Aksara.

### **Jurnal, Makalah, dan Surat Kabar**

Imawan, Riswandha. 1999. “Kampanye Tanpa Hura-Hura” dalam *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol.IV/Oktobre 1999 : Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Sugihandari, 2009. *Peta Politik Sulawesi Barat Cermin politik dalam Dua Masa*, Jakarta : *Harian Kompas*, 24 Februari

Syamsuddin, Nazaruddin. 1997. *Sistem politik indonesia Menghadapi perubahan Global Abad XXI*, Jakarta. BP7.

### **Dokumen**

Himpunan Undang-undang Bidang Politik, Jakarta :

Komisi pemilihan Umum (KPU)

Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-undang Republik indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum.